



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAPORAN TUGAS AKHIR

### TATA CARA ADMINISTRASI PEMINDAHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Disusun Oleh :

FAUZIA RAHMI

NIM : 01870623845



UIN SUSKA RIAU

**PRODI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**



## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**NAMA** : FAUZIA RAHMI  
**NIM** : 01870623845  
**PROGRAM STUDI** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : VII (TUJUH)  
**JUDUL** : TATA CARA ADMINISTRASI PEMINDAHAN NOMOR  
 POKOK WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN  
 PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN  
**TANGGAL UJIAN** : 26 OKTOBER 2021

Pekanbaru, 8 November 2021

Disetujui Oleh :

**PEMBIMBING**

**Dr. Muhammad April, S.H., M.HUM**  
**NIK. 130 712 072**

Mengetahui :

**WAKIL DEKAN I**

**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19790101 200710 1 003**

**KETUA PRODI**

**D3 Administrasi Perpajakan**

**Dr. Jh. Afzal, S.Hi, M.A**  
**NIP. 19790911 201101 1 033**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 NAMA : FAUZIA RAHMI  
 NIM : 01870623845  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VII (TUJUH)  
 JUDUL : TATA CARA ADMINISTRASI PEMINDAHAN NOMOR POKOK  
 WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 PRATAMA PEKANBARU TAMPAN  
 TANGGAL UJIAN : 26 OKTOBER 2021

Pekanbaru, November 2021

Disetujui Oleh :

KETUA PENGUJI

Henni Indrayani, SE, MM  
 NIP. 197008021998032003

ANGGOTA

PENGUJI I

Sahwitri Triandani, SE, S. Si  
 NIP. 19820806 200604 2 002

PENGUJI II

Dr. Muhammad April, S.H, M.HUM  
 NIK. 130 712 072

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauzla Rahmi

NIM : 01870623845

Tempat/Tgl. Lahir : Batusangkar, 13 - November 1999

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan sosial,

Prodi : D3 administrasi Per Pajak

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Tatacara administrasi Pemindahan nomor pokok wajib pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama pekan baru Tampan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 November 2021

Yang membuat pernyataan



NIM : 01870623845

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **TATA CARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMINDAHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN**

**OLEH :**

**FAUZIARAHMI**  
**NIM : 01870623845**

*Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan pada April 2021 hingga selesai. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang Tata Cara Pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP Pratama Lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Yang metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara, dokumentasi dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan tentang Tata Cara Pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP Pratama Lain. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu pemindahan NPWP masih mengalami kendala yaitu kekurangan kemauan dari wajib pajak untuk mengetahui bahwa pemindahan NPWP harus di laporkan sehingga tidak perlu membuat NPWP baru yang akan menyebabkan terjadinya tunggakan pajak yang merugikan wajib pajak itu sendiri.*

**Kata Kunci : NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah datang dengan islam dan Al-qur'an sebagai pedoman bagi segenap insan yang senantiasa teguh pendiriannya dalam melaksanakan ajarannya.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada **Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing terutama penulis tujukan kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Syarifuddin dan Ibunda Wahyu Ningsih yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan untaian do'anya demi kemajuan penulis, serta mendukung penuh dan memfasilitasi semua aktifitas perkuliahan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI.MA selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretasi Prodi D3 Administrasi Perpajakan.
  6. Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya, memberikan motivasi dan memberikan bimbingan sampai Tugas Akhir selesai.
  7. Kepada segenap jajaran staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
  8. Kepada sahabat terbaik penulis yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam berjuang menyelesaikan Tugas Akhir ini.
  9. Kepada Kakanda Thirafi Hadi Kusuma Afdal yang telah membantu Penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir Penulis
  10. Dan kepada semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil selama penulisan TA ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Aamiin Ya Rabbal'alam.
- Untuk mereka, penulis hanya bisa berdo'a semoga perbuatan baik mereka menjadi amal shaleh dan mendapatkan ke ridhaan dari Allah SWT. Aamiin.

Pekanbaru, 26 Agustus 2021

Penulis

Fauzia Rahmi  
NIM : 01870623845



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1. Lokasi Penelitian.....	6
1.5.2. Waktu Penelitian .....	6
1.5.3. Jenis dan Sumber Data.....	6
1.5.4. Metode Pengumpulan Data.....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>9</b>
2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	9
2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	10
2.2.1 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	10
2.2.2 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	10
2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	11
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK.....</b>	<b>12</b>
3.1 Tinjauan Teori.....	12
3.1.1 Pengertian Pajak.....	12
3.1.2 Ciri-ciri Pajak.....	12
3.1.3 Fungsi Pajak.....	13

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.4	Jenis Pajak.....	14
3.1.5	Sistem Pemungutan Pajak.....	17
3.1.6	Kewajiban Wajib Pajak.....	19
3.1.7	Pengertian NPWP dan Fungsi NPWP.....	22
3.1.8	Fungsi NPWP di Luar Urusan Perpajakan.....	24
3.1.9	Cara membuat NPWP .....	24
3.1.10	Sanksi Pelanggaran NPWP .....	26
3.1.11	Penghapusan NPWP .....	26
3.1.12	Format NPWP .....	28
3.1.13	Tata cara perubahan data wajib pajak dan pengusaha kena pajak .....	28
3.1.14	Pajak Menurut Syariah.....	29
3.2	Tinjauan Praktek .....	31
3.2.1.	Tata cara administrasi pemindahan NPWP dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP lain .....	31
3.2.2.	Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk mengatasi kendala yang dihadapi .....	49
3.2.3.	Hal-hal yang bersangkutan dalam proses pemindahan NPWP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	50
3.3	PERBANDINGAN TEORI DAN PRAKTEK .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>53</b>
4.1	kesimpulan .....	53
4.2	Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan .....	2
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak yang Telah Melakukan Pemindahan NPWP Dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP Pratama lain .....	3
Tabel 1.3 Bagan Tata Cara Administrasi Permohonan Pemindahan NPWP di KPP Lama.....	38
Tabel 1.4 Bagan Tata Cara Administrasi Permohonan Pemindahan NPWP di KPP Baru .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Format NPWP .....	25
------------------------------	----

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Peranan pajak sebagai penerimaan dalam negeri semakin besar. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rencana penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagai sumber utama anggaran pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Pasal I dinyatakan Kontribusi wajib kepada Negarayang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem Perpajakan yang berlaku saat ini menganut *self assessmentsystem*, yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepadaWajib Pajak(WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang, mulai dari menetapkan, menghitung, menyetor, sampai melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Dalam system ini kewenangan sepenuhnya diberikan kepada wajib pajak, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat. Sedangkanfiskus hanya mengawasi, guna menghindari kesalahan dalam tata cara atau proses pengadministrasian pelaporan pembayaran pajak. Sarana ini diperlukan untuk wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban adalah dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) merupakan identitas yang sangat diperlukan oleh setiap wajib pajak.

Permasalahan yang akan dibahas : “Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dimana NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Dalam hal berhubungan dengan NPWP penulis akan melakukan penelitian di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dikarenakan cukup banyaknya wajib pajak yang terdaftar. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan, jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah sebagai berikut :

**Tabel I.1**  
**Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP**  
**Pratama Pekanbaru Tampan**

Tahun	Jumlah WP	Penambahan WP Pertahun
2018	204.819	12.738
2019	216.614	11.795
2020	246.229	29.615

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Tahun 2018-2020

Berdasarkan data diatas, jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penambahan, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sangat drastis. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencatumkan NPWP yang dimilikinya dan apabila wajib pajak yang terdapat dalam tata usaha Direktorat Jendral Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan telah diberikan NPWP, karena sesuatu hal pindah tempat kependudukan kewilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama lain, maka wajib pajak tersebut diwajibkan mengisi surat pemberitahuan pindah yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama lama untuk kemudian diproses dan wajib pajak tersebut akan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang baru.

Pada dasarnya NPWP dapat dilakukan pemindahan sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-04/PJ/2020 dan diperkuat dengan surat edaran SE-60/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak.

Pemindahan NPWP ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

- a) Jika Wajib Pajak berpindah domisili keluar dari wilayah KPP lama.
- b) Jika perusahaan (badan) tidak lagi aktif berdomisili di alamat yang sesuai pada NPWP perusahaan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan, jumlah wajib pajak yang telah melakukan pemindahan NPWP adalah sebagai berikut :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Wajib Pajak yang Telah Melakukan Pemindahan NPWP**  
**Dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP Pratama lain**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Pindah
2018	236
2019	634
2020	175

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Tahun 2018-2020

Dari tabel diatas bisa kita lihat pemindahan NPWP paling banyak terdapat pada tahun 2019 yang berjumlah 634 sedang di tahun 2018 hanya sebanyak 236 dan di tahun 2020 sebanyak 175. Namun, saat ini banyak wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa pemindahan NPWP harus dilaporkan sehingga tidak perlu membuat NPWP baru.

Oleh karena itu, berangkat dari pengalaman pribadi penulis yang mendapati banyaknya wajib pajak yang bingung dan tidak mengerti akan langkah yang harus dilakukan terhadap NPWP sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan saat pindah alamat atau tempat kedudukan. Berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik memutuskan untuk mengangkat judul penelitian tugas akhir, yaitu **“Tata Cara Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”**.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang ditemukan yaitu :

1. Bagaimana tata cara administrasi pemindahan nomor pokok wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pekanbaru tampan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam tata cara penyelesaian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi pemindahan nomor pokok wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan?

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam tata cara penyelesaian administrasi pemindahan nomor pokok wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan?

### 1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari laporan tugas akhir adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara administrasi pemindahan nomor pokok wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam tata cara penyelesaian administrasi pemindahan nomor pokok wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam tata cara penyelesaian administrasi pemindahan nomor pokok wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru.

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

- a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tata cara pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP Pratama lainnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan tata cara pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dimasa yang akan datang.
- c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi D3 Administrasi Perpajakan dalam memahami tata cara pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP Pratama lainnya.

## 1.5 METODE PENELITIAN

### 1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

### 1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dilakukan pada bulan April 2021 – Juli tahun 2021.

### 1.5.3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder adalah yang diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

### 1.5.4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan wawancara langsung kepada Staff Pelaksana TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) KPP Pratama Pekanbaru.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dokumentasi

Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

c. Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan pemanfaatan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan, struktur organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan.



### BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan teori-teori dan praktek yang mendukung penelitian yang meliputi : Pengertian pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, kewajiban wajib pajak, pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cara membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sanksi pelanggaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara perubahan data wajib pajak dan pengusaha kena pajak, tata cara pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak dan pengusaha kena pajak dari, pajak menurut Syariah, Tata cara administrasi pemindahan NPWP dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP lain, Kendala yang dihadapi dalam tata cara penyelesaian administrasi pemindahan NPWP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk mengatasi kendala yang dihadapi, Hal-hal yang bersangkutan dalam proses pemindahan NPWP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 2.1 SEJARAH SINGKAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenanganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagian wilayah kota Pekanbaru yang meliputi 5 kecamatan sebagai berikut :





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kecamatan Tampan
2. Kecamatan Payung Sekaki
3. Kecamatan Marpoyan Damai
4. Kecamatan Bukit Raya
5. Kecamatan Sukajadi

Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah wilayah pengembangan kota Pekanbaru dengan kegiatan bisnis yang berkembang pesat di bidang pemerintahan, perdagangan dan jasa. Saat ini, KPP Pratama Pekanbaru Tampan beralamat di Jalan Ring Road Arengka II (Jalan SM Amin), Pekanbaru, Riau.

## 2.2 VISI DAN MISI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

### 2.2.1 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Menjadi unit kerja penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.

### 2.2.2 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi direktorat jenderal pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional.
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

## 2.3 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK

### PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Adapun bagian / unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Tampam adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor.
2. Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal.
3. Kasi Pengolahan Data dan Informasi.
4. Kasi Pelayanan.
5. Kasi Penagihan.
6. Kasi Pemeriksaan.
7. Kasi Ekstensifikasi.
8. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III,IV.
9. Kasi Fungsional.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat disimpulkan bahwa tata cara pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bisa dikatakan baik. Karena tata cara pemindahan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan masih mengacu pada regulasi yang mengatur sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.
2. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ditemukan beberapa kendala yang di hadapi dalam proses pemindahan NPWP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, yaitu;
  - a. Jaringan yang tidak stabil dan sistem di website perekaman permohonan yang terkadang terdapat gangguan.
  - b. Lamanya pengiriman berkas oleh pihak ke-tiga yaitu jasa kurir yang telah diberikan kepercayaan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP baru.
  - c. Lamanya pemberitahuan disampaikan kepada KPP Pratama Pekanbaru Tampan oleh KPP baru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Banyaknya wajib pajak yang tidak mengerti tata cara pemindahan NPWP dan tidak mengetahui kemudahan yang telah disediakan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam hal proses pemindahan NPWP.
- e. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa pemindahan NPWP tidak harus datang langsung ke KPP terdaftar dan permohonan pemindahan NPWP dapat dikirimkan melalui kantor pos atau fax email.
3. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk mengatasi kendala layanan sistem secara online, yaitu;
  - a. Untuk mengatasi layanan sistem secara online dapat dilakukan dengan melaporkan permasalahan melalui layanan sistem online internal yang disediakan oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan yang bernama lasis online .
  - b. KPP Pratama Pekanbaru Tampan harusnya melaksanakan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk dapat melakukan pemindahan NPWP jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

#### 4.2 SARAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan diharapkan untuk mempermudah bahasa dalam tata cara pemindahan NPWP agar masyarakat awam mudah memahinya, dan melaksanakan sosialisasi dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk dapat melakukan pemindahan NPWP Ketika telah memenuhi kriteria yang di sampaikan KPP Pratama Pekanbaru Tampan.



## DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fitriandi, Primandita; Yuda Aryanto, Agus Puji priyono. 2018. *Komplikasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dkk. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayah, Nurdin; Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Refisi 2008*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Edisi ke-66. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

### Peraturan Perundang - undangan

- Pasal 1 angka 6 UU KUPNo.16 Tahun 2009 tentang Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013

<https://www.pajakbro.com/2017/01/perbedaan-npwp-pusat-dan-npwp-cabang.html> diakses pada Kamis 8 Juli 2021 pukul 20.19 WIB

<https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-04pj2020> diakses pada Kamis 8 Juli 2021 pukul 22.03 WIB

<https://softwarepajak.net/news/131> diakses pada 8 Juli 2021 pukul 22.43 WIB



## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 247, PEKANBARU 28116  
TELEPON 0761-28201, 28104, 28103, FAKSIMILE 0761-28202, 28107; SITUS [www.djprg.go.id](http://www.djprg.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRISIS PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [kepeduan@pajak.go.id](mailto:kepeduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Nomor : S-180/RISET/WPJ.02/2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Fauzia Rahmi**  
Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **05848-2021** pada **15 Juni 2021**, dengan informasi:

NIM : 01870623845  
Kategori riset : Gelar-D3  
Jurusan : Administrasi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim  
Judul Riset : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan  
Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **30 Juni 2021 s/d 29 Desember 2021**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Asprilantomiardiwidodo



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Pekanbaru Tampan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : FAUZIA RAHMI  
 NIM : 01870623845  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PAJAK  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : TATA CARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI  
 PEMINDAHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK  
 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

Disetujui oleh :

**PEMBIMBING**

**Dr. Muhammad April, S.H. M.Hum**  
 NIK. 130 712 072

Mengetahui :

**WAKIL DEKAN I**

**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI**

**D3 Administrasi Perpajakan**

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, MM**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

**Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, M.A**  
 NIP. 19790911 201101 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampian - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1799/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 15 Maret 2021 M  
1 Sya'ban 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala  
Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 247  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Fauzia Rahmi  
NIM. : 01870623845  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampian". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, M.Pd  
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU





## Draft Wawancara

Fauzia Rahmi (UIN Suska)

### Seksi Pelayanan

#### 1. Bagaimana tata cara penyelesaian administrasi pemindahan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pekanbaru Tampan?

- Pemindahan NPWP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan berpedoman pada PER-04/PJ/2020, dimana :

#### Permohonan Pemindahan NPWP di KPP Lama

- Wajib pajak mengisi Formulir Pemindahan wajib pajak dengan lengkap dan benar dan menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada Petugas Pendaftaran KPP Lama.
- Petugas Pendaftaran KPP Lama menerima Formulir Pemindahan wajib pajak dan dokumen pendukung, serta meneliti:
  - kelengkapan dan kesesuaian isian formulir; dan
  - kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.
- Berdasarkan penelitian, dalam hal permohonan wajib pajak:
  - dinyatakan lengkap, Petugas Pendaftaran KPP Lama:
    - menerbitkan BPS dan LPAD, menyerahkan BPS kepada wajib pajak, dan menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau
    - menerbitkan BPS dan LPAD, mengarsipkan BPS, dan menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir;
  - atau
  - dinyatakan belum lengkap, Petugas Pendaftaran KPP Lama:
    - mengembalikan permohonan kepada wajib pajak, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau
    - mengembalikan permohonan dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- Petugas Pendaftaran KPP Lama menyampaikan berkas permohonan kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.
- Kasi Pelayanan KPP Lama menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama untuk membuat konsep surat tugas penelitian bagi Petugas Penelitian Lapangan KPP Lama, dengan memperhatikan *Assignment* wajib pajak, wilayah kerja, serta kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk.
- Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama membuat dan menyampaikan konsep surat tugas penelitian kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.
- Kasi Pelayanan KPP Lama meneliti dan memaraf konsep surat tugas penelitian dan menyampaikannya kepada Kepala KPP Lama.
- Kepala KPP Lama meneliti dan menandatangani konsep surat tugas penelitian serta menyerahkannya kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Berdasarkan surat tugas penelitian, Petugas Penelitian Lapangan KPP Lama:
  - a. melakukan penelitian administrasi perpajakan dan/atau melakukan konfirmasi lapangan untuk memastikan wajib pajak tidak lagi berada di wilayah kerja KPP Lama dan/atau tidak melakukan kegiatan usaha di lokasi, serta meneliti status pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak;
  - b. membuat LHPT dan/atau uraian singkat profil wajib pajak; dan
  - c. menyampaikan LHPT kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.
10. Kasi Pelayanan KPP Lama menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Lama untuk merekam LHPT.
11. Berdasarkan LHPT, Petugas Pendaftaran KPP Lama menindaklanjuti dengan memastikan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan sesuai batas waktu:
  - a. dalam hal permohonan belum lewat waktu, Petugas Pendaftaran KPP Lama:
    - 1) mencetak konsep Surat Pindah, untuk permohonan yang diterima; atau
    - 2) mencetak konsep Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, untuk permohonan yang ditolak;
  - atau
  - b. dalam hal permohonan lewat waktu, Petugas Pendaftaran KPP Lama mencetak konsep Surat Pindah dan Berita Acara Pemindahan Tempat wajib pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu.
12. Petugas Pendaftaran KPP Lama menyampaikan konsep Surat Pindah, konsep Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, dan/atau Berita Acara Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.
13. Kasi Pelayanan KPP Lama meneliti dan menandatangani konsep Surat Pindah, konsep Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, dan/atau Berita Acara Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu, kemudian menyerahkannya kembali kepada Petugas Pendaftaran KPP Lama.
14. Petugas Pendaftaran KPP Lama menatausahakan:
  - a. Berita Acara Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu; dan/atau
  - b. Surat Pindah atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, dan menyampaikannya kepada wajib ajak serta menyampaikan Surat Pindah melalui fax atau sarana elektronik lainnya ke KPP Baru.
15. Berdasarkan Surat Pindah, Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama:
  - a. menyiapkan dokumen dan berkas Wajib Pajak untuk dikirimkan ke KPP Baru, termasuk uraian singkat profil Wajib Pajak dan dokumen permohonan lain di bidang perpajakan yang telah disampaikan ke KPP Lama namun belum diselesaikan;
  - b. mencetak konsep surat pengantar pengiriman dokumen dan berkas wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta menyampaikannya ke Kasi Pelayanan KPP Lama.
16. Kasi Pelayanan KPP Lama:
  - a. meneliti dokumen dan berkas wajib pajak; dan
  - b. meneliti serta menandatangani konsep surat pengantar pengiriman dokumen dan berkas wajib pajak,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta menyerahkannya kepada Petugas Pendaftaran KPP Lama.

17. Petugas Pendaftaran KPP Lama mengirimkan tembusan Surat Pindah, surat pengantar pengiriman dokumen dan berkas wajib pajak, serta dokumen dan berkas wajib pajak ke KPP Baru.
18. Kepala KPP Baru menugaskan Kasi Pelayanan KPP Baru untuk menindaklanjuti tembusan Surat Pindah dari KPP Lama atau Surat Pindah dari wajib pajak.
19. Kasi Pelayanan KPP Baru menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Baru untuk meneliti dan menindaklanjuti tembusan Surat Pindah dari KPP Lama atau Surat Pindah dari wajib pajak.
20. Petugas Pendaftaran KPP Baru:
  - a. meneliti informasi pemindahan wajib pajak pada Aplikasi Registrasi atau Surat Pindah dari KPP Lama atau dari wajib pajak dan menindaklanjuti dengan mencetak kartu NPWP;
  - b. menyampaikan Kartu NPWP kepada wajib pajak; dan
  - c. menatausahakan dokumen Surat Pindah dari KPP Lama atau Surat Pindah dari wajib pajak.
21. Dalam hal pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak berstatus PKP, atau berstatus PKP namun belum memiliki Akun PKP Aktif, proses selesai.
22. Dalam hal pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan terhadap wajib pajak dengan status PKP dan telah memiliki Akun PKP Aktif, Kasi Pelayanan KPP Baru menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Baru untuk membuat konsep surat tugas penelitian lapangan bagi Petugas Penelitian Lapangan KPP Baru, dengan memperhatikan *Assignment* wajib pajak, wilayah kerja, serta kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk.
23. Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Baru mencetak konsep surat tugas penelitian lapangan dan menyampaikan kepada Kasi Pelayanan KPP Baru.
24. Kasi Pelayanan KPP Baru meneliti dan memaraf konsep surat tugas penelitian lapangan serta menyampaikannya kepada Kepala KPP Baru.
25. Kepala KPP Baru menyetujui dan menandatangani konsep surat tugas penelitian lapangan dan menyerahkannya kepada Kasi Pelayanan KPP Baru.
26. Kasi Pelayanan KPP Baru menyerahkan surat tugas penelitian lapangan kepada Petugas Penelitian Lapangan KPP Baru.
27. Berdasarkan surat tugas penelitian lapangan, Petugas Penelitian Lapangan KPP Baru:
  - a. melakukan penelitian administrasi perpajakan dan konfirmasi lapangan untuk memastikan keberadaan dan kegiatan usaha/kegiatan wajib pajak;
  - b. membuat LHPT; dan
  - c. menyampaikan LHPT kepada Kasi Pelayanan KPP Baru.
28. Kasi Pelayanan KPP Baru menelaah dan menandatangani LHPT, serta menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Baru untuk menindaklanjuti dengan:
  - a. menatausahakan dokumen, dalam hal LHPT menyatakan bahwa tempat kegiatan usaha sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; atau
  - b. melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan, dalam hal LHPT menyatakan bahwa tempat kegiatan usaha tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
29. Proses selesai.

#### - Pemindahan NPWP di KPP Baru

1. Wajib pajak mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap dan benar dan menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada Petugas Pendaftaran KPP Baru atau KP2KP Baru.
2. Petugas Pendaftaran KPP Baru menerima Formulir Pemindahan Wajib Pajak dan dokumen pendukung, serta meneliti:
  - a. kelengkapan dan kesesuaian isian formulir; dan
  - b. kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berdasarkan penelitian, dalam hal permohonan wajib pajak:
  - a. dinyatakan lengkap, Petugas Pendaftaran KPP Baru atau KP2KP Baru melakukan *upload* dokumen pada Aplikasi Registrasi, kemudian menerbitkan dan menyerahkan BPS kepada wajib pajak; atau
  - b. dinyatakan belum lengkap, Petugas Pendaftaran KPP Baru atau KP2KP Baru:
    - 1) mengembalikan permohonan kepada wajib pajak, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau
    - 2) mengembalikan permohonan dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
4. Kepala KPP Baru atau KP2KP Baru meneruskan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a melalui Aplikasi Registrasi kepada Kepala KPP Lama.
5. Petugas Pendaftaran KPP Lama memantau informasi permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar yang disampaikan ke KPP Baru atau KP2KP Baru pada Aplikasi Registrasi setiap hari kerja, mencetak permohonan wajib pajak, dan meneruskan permohonan kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.
6. Kasi Pelayanan KPP Lama menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama untuk membuat konsep surat tugas penelitian bagi Petugas Penelitian Lapangan KPP Lama, dengan memperhatikan *Assignment* wajib pajak, wilayah kerja, serta kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk.
7. Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama membuat dan menyampaikan konsep surat tugas penelitian kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.
8. Kasi Pelayanan KPP Lama meneliti dan memaraf konsep surat tugas penelitian dan menyampaikannya kepada Kepala KPP Lama.
9. Kepala KPP Lama meneliti dan menandatangani konsep surat tugas penelitian serta menyerahkannya kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.
10. Berdasarkan surat tugas penelitian, Petugas Penelitian Lapangan KPP Lama:
  - a. melakukan penelitian administrasi perpajakan dan/atau melakukan konfirmasi lapangan untuk memastikan wajib pajak tidak lagi berada di wilayah kerja KPP Lama dan/atau tidak melakukan kegiatan usaha di lokasi, serta meneliti status pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak;
  - b. membuat LHPt dan/atau uraian singkat profil wajib pajak; dan
  - c. menyampaikan LHPt kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.
11. Kasi Pelayanan KPP Lama menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Lama untuk merekam LHPt.
12. Berdasarkan LHPt, Petugas Pendaftaran KPP Lama menindaklanjuti dengan memastikan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan sesuai batas waktu:
  - a. dalam hal permohonan belum lewat waktu, Petugas Pendaftaran KPP Lama:
    - 1) mencetak konsep Surat Pindah, untuk permohonan yang diterima; atau
    - 2) mencetak konsep Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, untuk permohonan yang ditolak;
 atau
  - b. dalam hal permohonan lewat waktu, Petugas Pendaftaran KPP Lama mencetak konsep Surat Pindah dan Berita Acara Pemindahan Tempat wajib pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu.
13. Petugas Pendaftaran KPP Lama menyampaikan konsep Surat Pindah, konsep Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, dan/atau Berita Acara Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu kepada Kasi Pelayanan KPP Lama.
14. Kasi Pelayanan KPP Lama meneliti dan menandatangani konsep Surat Pindah, konsep Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, dan/atau Berita Acara Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu, kemudian menyerahkannya kembali kepada Petugas Pendaftaran KPP Lama.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Petugas Pendaftaran KPP Lama menatausahakan:
  - a. Berita Acara Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu; dan/atau
  - b. Surat Pindah atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah, dan menyampaikannya kepada wajib pajak serta menyampaikan Surat Pindah melalui fax atau sarana elektronik lainnya ke KPP Baru.
16. Berdasarkan Surat Pindah, Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama:
  - a. menyiapkan dokumen dan berkas wajib pajak untuk dikirimkan ke KPP Baru, termasuk uraian singkat profil wajib pajak dan dokumen permohonan lain di bidang perpajakan yang telah disampaikan ke KPP Lama namun belum diselesaikan;
  - b. mencetak konsep surat pengantar pengiriman dokumen dan berkas wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 serta menyampaikannya ke Kasi Pelayanan KPP Lama.
17. Kasi Pelayanan KPP Lama:
  - a. meneliti dokumen dan berkas wajib pajak; dan
  - b. meneliti serta menandatangani konsep surat pengantar pengiriman dokumen dan berkas wajib pajak, serta menyerahkannya kepada Petugas Pendaftaran KPP Lama.
18. Petugas Pendaftaran KPP Lama mengirimkan tembusan Surat Pindah, surat pengantar pengiriman dokumen dan berkas wajib pajak, serta dokumen dan berkas wajib pajak ke KPP Baru.
19. Kepala KPP Baru menugaskan Kasi Pelayanan KPP Baru untuk menindaklanjuti tembusan Surat Pindah dari KPP Lama atau Surat Pindah dari wajib pajak.
20. Kasi Pelayanan KPP Baru menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Baru untuk meneliti dan menindaklanjuti tembusan Surat Pindah dari KPP Lama atau Surat Pindah dari wajib pajak.
21. Petugas Pendaftaran KPP Baru:
  - a. meneliti informasi pemindahan Wajib Pajak pada Aplikasi Registrasi atau Surat Pindah dari KPP Lama atau dari Wajib Pajak dan menindaklanjuti dengan mencetak kartu NPWP;
  - b. menyampaikan Kartu NPWP kepada wajib pajak; dan
  - c. menatausahakan dokumen Surat Pindah dari KPP Lama atau Surat Pindah dari wajib pajak.
22. Dalam hal pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak berstatus PKP, atau berstatus PKP namun belum memiliki Akun PKP Aktif, proses selesai.
23. Dalam hal pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan terhadap wajib pajak dengan status PKP dan telah memiliki Akun PKP Aktif, Kasi Pelayanan KPP Baru menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Baru untuk membuat konsep surat tugas penelitian lapangan bagi Petugas Penelitian Lapangan KPP Baru, dengan memperhatikan *Assignment* wajib pajak, wilayah kerja, serta kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk.
24. Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Baru mencetak konsep surat tugas penelitian lapangan dan menyampaikannya kepada Kasi Pelayanan KPP Baru.
25. Kasi Pelayanan KPP Baru meneliti dan memaraf konsep surat tugas penelitian lapangan serta menyampaikannya kepada Kepala KPP Baru.
26. Kepala KPP Baru menyetujui dan menandatangani konsep surat tugas penelitian lapangan dan menyerahkannya kepada Kasi Pelayanan KPP Baru.
27. Kasi Pelayanan KPP Baru menyerahkan surat tugas penelitian lapangan kepada Petugas Penelitian Lapangan KPP Baru.
28. Berdasarkan surat tugas penelitian lapangan, Petugas Penelitian Lapangan KPP Baru:
  - a. melakukan penelitian administrasi perpajakan dan konfirmasi lapangan untuk memastikan keberadaan dan kegiatan usaha/kegiatan wajib pajak;
  - b. membuat LHPT; dan
  - c. menyampaikan LHPT kepada Kasi Pelayanan KPP Baru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kasi Pelayanan KPP Baru menelaah dan menandatangani LHPT, serta menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Baru untuk menindaklanjuti dengan:
    - menatausahakan dokumen, dalam hal LHPT menyatakan bahwa tempat kegiatan usaha sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; atau
    - melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan, dalam hal LHPT menyatakan bahwa tempat kegiatan usaha tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Proses selesai.

**2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam tata cara penyelesaian administrasi pemindahan NPWP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?**

- Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang pertama, yaitu; Jaringan yang tidak stabil dan sistem di website perekaman permohonan yang terkadang terdapat gangguan  
 Lamanya pengiriman berkas oleh pihak ke-tiga yaitu jasa kurir yang telah diberikan kepercayaan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan ke KPP baru  
 Lamanya pemberitahuan disampaikan kepada KPP Pratama Pekanbaru Tampan oleh KPP baru
- Kendala yang dihadapi oleh wajib pajak, yaitu;
  - Banyaknya wajib pajak yang tidak mengerti tata cara pemindahan NPWP dan tidak mengetahui kemudahan yang telah disediakan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam hal proses pemindahan NPWP
  - Masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa pemindahan NPWP tidak harus datang langsung ke KPP terdaftar dan permohonan pemindahan NPWP dapat dikirimkan melalui kantor pos atau fax email

**3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam tata cara penyelesaian administrasi pemindahan NPWP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan ?**

- Untuk mengatasi layanan sistem secara online dapat dilakukan dengan melaporkan permasalahan melalui layanan sistem online internal yang disediakan oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan yang bernama lasis online
- KPP Pratama Pekanbaru Tampan harusnya melaksanakan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk dapat melakukan pemindahan NPWP jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

**4. Bagaimana tata cara Permohonan Pindah di KPP Lama ?**

- Wajib pajak mengambil antrian online melalui [kunjung.pajak.go.id](http://kunjung.pajak.go.id)
- Wajib pajak mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap dan benar dan menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada Petugas Pendaftaran



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPP Lama.

- Petugas Pendaftaran KPP Lama menerima Formulir Pemindahan Wajib Pajak dan dokumen pendukung, serta meneliti kelengkapan dan kesesuaian isian formulir dan kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.
- Apabila persyaratan telah sesuai, Petugas pendaftaran menerbitkan Bukti Penerimaan Surat Untuk Wajib Pajak, dan apabila tidak lengkap petugas akan mengembalikan berkas kepada wajib pajak.
- Penerbitan Surat Pindah atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah oleh KPP Lama dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan BPE/BPS.
- Penerbitan Kartu NPWP oleh KPP Baru dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Surat Pindah diterima KPP Baru.
- Pelaksanaan penelitian lapangan oleh KPP Baru dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Pindah diterima KPP Baru ( Untuk wajib pajak yang pindah berstatus PKP )

#### 5. Bagaimana tata cara Pindah Masuk di KPP Baru ?

- Wajib pajak mengambil antrian online melalui [kunjung.pajak.go.id](http://kunjung.pajak.go.id)
- Wajib pajak mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap dan benar dan menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada Petugas Pendaftaran KPP Baru.
- Petugas Pendaftaran KPP Baru menerima Formulir Pemindahan wajib pajak dan dokumen pendukung, serta meneliti kelengkapan dan kesesuaian isian formulir dan kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.
- Apabila persyaratan telah sesuai, Petugas pendaftaran menerbitkan Bukti Penerimaan Surat Untuk Wajib Pajak, dan apabila tidak lengkap petugas akan mengembalikan berkas kepada wajib pajak.
- Permohonan pemindahan NPWP yang diterima dan diinput ke sistem oleh petugas di KPP Baru akan otomatis masuk ke sistem erag petugas pendaftaran di KPP Lama untuk ditindaklanjuti
- Penerbitan Surat Pindah atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah oleh KPP Lama dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan BPE/BPS.
- Penerbitan Kartu NPWP oleh KPP Baru dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Surat Pindah diterima KPP Baru.
- Pelaksanaan penelitian lapangan oleh KPP Baru dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Pindah diterima KPP Baru ( Untuk wajib pajak yang pindah berstatus PKP )

#### 6. Seksi/Unit Kerja mana yang mengurus pemindahan NPWP di KPP Pekanbaru Tampan ?

- Untuk penyelesaian permohonan pemindahan NPWP dilakukan oleh Seksi Pelayanan

#### 7. Apa saja syarat melakukan pemindahan NPWP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan ?

- Formulir permohonan
- Dokumen pendukung ( Fotokopi KTP di alamat baru untuk WP OP, Surat keterangan Domisili Usaha/NIB/SIUP/SITU di alamat baru untuk WP Badan )

#### 8. Bagaimana kriteria wajib pajak yang mengajukan pemindahan NPWP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan ?



- Wajib pajak yang berdasarkan dokumen pendukung sudah berada di luar wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat mengajukan permohonan pemindahan NPWP ke wilayah kerja KPP sesuai dokumen pendukung, begitu pula sebaliknya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama penulis Fauzia Rahmi. Penulis lahir di Batusangkar pada tanggal 13 November 1999. Putri dari Bapak Syarifuddin dan Ibu Wahyu Ningsih. Penulis merupakan anak ke lima dari lima bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Nagari Buo, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu berawal dari TK Pertiwi Buo, lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis mendaftar sebagai seorang siswa di SD N 09 Buo dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke SLTP yaitu SMP N 2 Lintau Buo lalu menyelesaikan pendidikan di SLTP tersebut pada tahun 2015. Selesai menempuh pendidikan di SMP N 2 Lintau Buo penulis melanjutkan pendidikan ke Tingkat SLTA yaitu SMA N 2 Lintau Buo dan lulus pada tahun 2018. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan disebuah universitas negeri didaerah Pekanbaru, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jalur Mandiri pada program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Sosial.

Berkat rahmat Allah SWT yang maha kuasa, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad April, S.H. M.Hum dengan judul **“TATA CARA ADMINISTRASI PEMINDAHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.